

Pengaruh Diaspora India di Malaysia dalam Hubungan Bilateral India – Malaysia

Siti Sulistyani

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: sulistya63@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the influence of Indian diaspora in Malaysia in bilateral relations between Malaysia and India and to see the effectiveness of Indian diaspora management in Malaysia in strengthening India-Malaysia relations. The Indian diaspora has had an influence on bilateral relations between both countries ever since the independence of Malaysia. This is evident from the cooperation between both countries that always mutually prioritize each other. In addition, the Indian diaspora in Malaysia is in a fragile position, where on the one hand it can support bilateral relations and, on the other hand, could undermine it. The effectiveness of Indian diaspora management in Malaysia itself can still be improved, and this requires more involvement from the Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA) which aims to regulate the Indian diaspora and turn the Indian diaspora into one of the strategic resources for India.

Kata Kunci: *Diaspora, Bilateral Relations, Diaspora's Role, Diaspora Management Policy.*

Hubungan diplomatik antara New Delhi dan Kuala Lumpur mulai berlangsung pada tahun 1957, ketika Malaysia merdeka. Perdana Menteri pertama dari kedua negara tersebut, Tuanku Abdul Rahman dan Jawaharlal Nehru secara bersama membangun hubungan baik dan mempromosikan kepentingan masing-masing di kedua negara. Seiring berjalannya waktu banyak etnis India yang kemudian menetap di Malaysia. Kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai Diaspora India di Malaysia. Diaspora India sendiri telah muncul sebagai salah satu yang terbesar di dunia global saat ini.

Hingga akhir tahun 1939, sekitar 700,000 diaspora India menetap di Malaya. Para diaspora India dari kelas pekerja sendiri diisolasi secara politik dan sosial dengan ketat. Dengan

berkembangnya waktu, diaspora India tidak lagi berada di pekerjaan tingkat rendah dan dengan terbentuknya *Malaysian Indian Congress* (MIC) pada tahun 1946, diaspora India mulai memasuki ranah pemerintahan Malaysia. MIC memposisikan diri sebagai perwakilan dari komunitas India di Malaysia. Meskipun menjadi bagian dari koalisi Barisan Nasional, ketiga partai besar ini tetap merupakan partai yang berbasis etnis yang mana membuktikan bahwa politik rasial masih tetap ada di Malaysia. Barisan Nasional kemudian merupakan satu-satunya koalisi yang memiliki waktu terlama yang memerintah di Malaysia bahkan satu-satunya di antara negara-negara yang menganut sistem demokrasi.

Kehadiran diaspora India di Malaysia merupakan faktor penting dan penentu dalam hubungan India dengan negara

tuan rumah. Setiap negara Asia Tenggara memiliki baik PIO atau NRI, tapi Malaysia menempati posisi penting dalam hal ini, karena menampung jumlah terbesar dari ekspatriat India di Asia Tenggara, yang mencapai hingga 7,3% dari penduduknya. Hanya 6% yang dalam kategori administratif, profesional atau manajerial. Penduduk India di Malaysia hanya menguasai proporsi sebesar 1,5% dari kekayaan negara itu. India juga merupakan salah satu negara yang sejak dini telah memperhatikan diaspora sebagai aset negaranya. MOIA memiliki enam tujuan utama yang harus tercapai, yang mana salah satunya adalah menjadikan diaspora India sebagai sumber daya yang strategis. MOIA dengan cermat mengamati bahwa sekarang ini terdapat banyak diaspora India yang memegang jabatan penting yang dapat mempengaruhi perpolitikan dan perekonomian negara *host*-nya.

Diaspora India di wilayah perkotaan Malaysia memainkan peranan yang cukup signifikan dan dapat ditemukan hampir di segala bidang pekerjaan. Sebagian besar dari diaspora India tetap terlibat dalam perkebunan karet dan kelapa sawit. Terdapat juga sejumlah diaspora India yang bekerja di bidang jasa, seperti polisi, transportasi dan bisnis makanan, begitu juga dalam bidang hukum dan kesehatan. Kesenjangan dan ketidaksetaraan yang terjadi di dalam distribusi pemasukan antara etnis di Malaysia ini kemudian memuncak menjadi sebuah kerusuhan antar etnis pada tanggal 13 Mei 1969. Penjelasan resmi dari pemerintah Malaysia terhadap timbulnya kerusuhan tersebut adalah sebagai reaksi dari ketidaksetaraan yang terjadi antar komunitas etnis yang berbeda.

Diaspora India telah muncul sebagai salah satu yang terbesar di dunia global saat ini. Ada lebih dari 20 juta PIOs dan

terhitung enam juta NRIs tersebar di 136 negara. Diaspora India mengambil pangsa lebih dari 40% dalam populasi di Fiji, Mauritius, Trinidad, Guyana dan Suriname (Dubey 2003). Gelombang migrasi diaspora India dapat dibagi menjadi tiga bagian merujuk pada waktu migrasinya, yaitu; *the Old Diaspora*, *the New Diaspora*, dan *the Gulf Diaspora* (Rao 2012). *The Old Diaspora* dimulai sekitar tahun 1900 yang kemudian menjadi cikal bakal diaspora India yang diberangkatkan ke Malaysia. Pada kerangka waktu ini pula, pedagang – pedagang India mulai berlayar dan cukup banyak yang kemudian berdiam di Malaysia. Gelombang kedua dan ketiga migrasi ini yang terdiri dari tenaga kerja ahli kebanyakan tidak lagi memilih Malaysia sebagai tujuan utama dan memilih negara barat dan timur tengah sebagai tujuannya (Rao 2012).

Setelah masa kebijakan NEP, perekonomian Malaysia memiliki kebijakan baru yang merupakan revisi dari NEP namun tetap membawa tujuan yang sama untuk mengutamakan kemajuan perekonomian kaum bumiputera. Kebijakan setelah NEP dinamakan *National Development Policy* (selanjutnya akan disebut NDP) yang diimplementasikan selama periode 1991-2000 dan *National Vision Policy* (selanjutnya akan disebut NVP) untuk periode 2001-2010. Pada kedua kebijakan terakhir ini, pemerintah Malaysia mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam meningkatkan partisipasi kaum bumiputera di mana pemerintah lebih fokus untuk mendampingi dan mengusahakan bidang wirausaha dan peningkatan *skill* kerja masyarakat (Menon 2008). Hal ini cukup memberikan energi positif bagi perekonomian antar kelompok etnis di Malaysia, karena pemerintah mengurangi ketergantungan kaum bumiputera yang memberikan

gambaran adanya diskriminasi negatif dalam perekonomian.

Perdana Menteri Najib Razak menerima jabatannya pada tahun 2009 dan merupakan hal yang membahagiakan bagi banyak kalangan terutama bagi masyarakat India di Malaysia. Najib Razak membentuk Komite Khusus Kabinet untuk Komunitas India di bawah departemen Perdana Menteri. Bagi komunitas India sendiri, Perdana Menteri Najib Razak merupakan pemimpin yang selalu memperhatikan komunitas India. Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara Malaysia, komunitas India menerima alokasi dana dari pemerintah sebesar 5,35 miliar RM dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak (Menon 2008).

Sebagai sesama negara berkembang dari wilayah Asia dengan latar belakang kolonialisme yang sama, Malaysia dan India memiliki perhatian yang sama dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional mereka. Seiring berjalannya waktu dan proses globalisasi, Malaysia dan India kemudian menyadari betapa pentingnya membentuk kerjasama di bidang ekonomi. Baik Malaysia maupun India masing-masing melihat potensi yang besar satu sama lain. Kepentingan keamanan Malaysia dalam lingkup regional dan globalnya tidak mengalami perubahan yang cukup besar sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1957, demikian pula dengan India yang merdeka sepuluh tahun lebih awal. Pengalaman historis yang dimiliki India menyangkut pemisahan administratif antara dengan Pakistan dan Bangladesh hampir serupa dengan pengalaman Malaysia dan Singapura. Baik India dan Malaysia pernah memiliki masa – masa yang darurat dan keduanya berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Kedua negara ini berhasil melakukan usaha-usaha untuk membangun dan mempersatukan bangsanya di atas segala keberagaman yang seringkali menjadi permasalahan internal bagi kedua negara ini (Balakhrisnan 2001).

Diaspora India dan Hubungan Bilateral India – Malaysia

Dalam beberapa dekade terakhir di abad ke-20, lebih kurang hampir 10 juta orang dari India melakukan migrasi dan tinggal di luar India. Aliran perpindahan manusia ini didorong oleh adanya tekanan demografi, ekonomi dan politik. Namun, migrasi dari India sendiri sebenarnya telah terjadi di abad-abad awal dengan maksud dan tujuan yang berbeda daripada sekarang ini. Sebagai salah satu negara dengan jumlah diaspora India terbesar di dunia, Malaysia tentu saja memiliki banyak diaspora India yang berpengaruh, baik itu di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Diaspora India di Malaysia sendiri telah mengisi bagian di berbagai sektor Malaysia, baik itu ekonomi dan politik.

Diaspora India masa kini telah menjadi salah satu kebanggaan dan aset bagi negara India. Terdapat beberapa organisasi diaspora India di luar negeri yang berdasarkan budaya, agama, profesi dan amal. Diaspora India yang terorganisasi dengan baik tidak lepas dari kesuksesan masing-masing diaspora India di negara tempat berdiamnya saat ini. Dari segi ekonomi, terdapat banyak wirausahawan India, CEO, pembuat film dan tentu saja ahli-ahli teknologi informasi yang sukses membawa nama India. Selain itu, dunia politik juga sudah cukup lama diisi oleh orang – orang India baik itu dari tingkat partai politik hingga menteri dan parlemen. Amerika Serikat sendiri memiliki dua gubernur negara bagian yang merupakan keturunan India dan Inggris memiliki beberapa perwakilan keturunan India di parlemennya.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah diaspora India terbesar di dunia, Malaysia tentu saja memiliki banyak diaspora India yang berpengaruh, baik itu di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Hal ini tidak lepas dari lamanya diaspora India telah ada di Malaysia dan sejarah diaspora India di

Malaysia yang cukup berpengaruh dalam proses meraih kemerdekaan Malaysia dari Inggris. Diaspora India di Malaysia sendiri telah mengisi bagian di berbagai sektor Malaysia, baik itu ekonomi dan politik. Pernikahan campur antara etnis India dan Melayu juga banyak terjadi meskipun hal ini mengakibatkan dihapusnya identitas India dari diaspora India tersebut.

Kerusuhan Mei 1969 menuntun kepada adanya penetapan kembali berbagai kebijakan pembangunan di Malaysia. Dapat dikatakan bahwa kerusuhan tersebut merupakan alasan dan penyebab terbesar dari pembuatan kebijakan perekonomian baru Malaysia yang diberi nama *The New Economic Policy* (selanjutnya akan disebut dengan NEP) pada tahun 1971. Hingga akhir dari program NEP ini pada tahun 1990, pertumbuhan ekonomi secara signifikan dirasakan oleh kaum bumiputera dan sebaliknya penurunan dialami oleh kaum Tionghoa dan India, mencakup di dalamnya peningkatan jumlah populasi bumiputera yang bekerja dan penurunan bagi kaum Tionghoa dan India. Kebijakan yang pro-Malay ini secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi berbagai sektor di Malaysia seperti pendidikan, birokrasi, hingga hak etnis dan kultural. Namun kesenjangan yang nyata ini tidak dapat begitu saja ditantang oleh etnis yang yang terbelakang dikarenakan adanya larangan untuk membicarakan isu yang dianggap sensitif ini oleh konstitusi Malaysia (Singh 2015).

Implementasi dari kebijakan ekonomi ini diturunkan ke dalam rencana-rencana pembangunan lima tahun Malaysia, yaitu *Second, Third, Fourth* dan *Fifth Malaysia Plan* selama 20 tahun. Penerapan NEP mengakibatkan meningkatnya marginalisasi bagi pekerja India dalam sektor publik seperti transportasi dan komunikasi. Posisi buruh India perlahan semakin ditolak dalam sektor perkebunan dan dampak buruknya sebagian besar dirasakan yang bermukim di wilayah perkotaan berkaitan dengan

ditingkatkannya pekerja bumi putera disektor publik tersebut. Disisi lain, meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan produksi yang berorientasi ekspor kemudian menyerap pengangguran India yang sebelumnya bekerja di perkebunan dan sektor publik (Gopal & Karupiah 2013).

Adanya slogan *1Malaysia* yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada awal tahun 2010 diharapkan dapat menjadi pendukung terjadinya keharmonisan antar etnis dan rasa kebersamaan yang tinggi untuk menciptakan negara Malaysia yang bersatu tanpa memandang perbedaan etnis. Dengan program tersebut, pemerintahan Malaysia juga mulai mengurangi kursi-kursi pemerintahan bagi bumiputera dan hak-hak istimewa bagi bumiputera pun mulai dikurangi sedikit demi sedikit. Diaspora India yang berada di Malaysia hingga saat ini tidak lagi merasakan diskriminasi oleh penduduk Malaysia dan telah dibentuk beberapa badan oleh perdana menteri Malaysia untuk membantu dan meningkatkan keberadaan wirausahawan India di Malaysia (Menon 2008). Selain itu, diaspora India yang sejak lama telah berada dalam dunia perpolitikan dan pemerintahan Malaysia juga semakin bertambah kuantitasnya. Partai politik yang mengakomodasi etnis India semakin bertambah jumlahnya dan juga jumlah diaspora India yang menduduki kursi menteri juga semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini dianggap mampu meningkatkan saluran suara bagi diaspora India yang berada di Malaysia.

Namun, tidak sedikit pula penolakan yang terjadi terhadap peningkatan ini dikarenakan beberapa jabatan menteri yang dipegang oleh diaspora India merupakan jabatan yang cukup penting. Salah satu perwakilan dari partai *United Malays National Organization* menyampaikan bahwa jabatan menteri sumber daya manusia harus tetap dipegang oleh etnis Melayu, bukannya etnis India. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan meningkatkan jumlah

etnis India sebagai pegawai negeri sipil yang diajukan oleh menteri sumber daya manusia yang beretnis India. Untuk partai *Malaysian Indian Congress* (selanjutnya akan disebut MIC) sendiri hingga sekarang ini keberadaannya tidak terlalu signifikan dalam membawa suara-suara etnis India di Malaysia. Meski begitu, partai ini telah memberikan kursi menteri bagi etnis India di Malaysia. Di awal tahun 2015, partai MIC memiliki krisis kepemimpinan internal karena tidak berjalannya regenerasi di dalam partai dengan baik. Masalah tersebut langsung ditindaklanjuti oleh perdana menteri Malaysia demi menghindari adanya konflik berlanjut, juga mengingat dekatnya waktu pemilihan umum di Malaysia.

India sendiri sempat membuat sedikit kontroversi dengan membina hubungan pertemanan dengan Uni Soviet pada era Perang Dingin. Hal ini menimbulkan impresi negatif dari beberapa negara, termasuk Malaysia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Namun, Malaysia sendiri tidak terlalu memepermasalahkan kebijakan luar negeri India tersebut. Sebaliknya, timbul inisiatif dan ketertarikan dari Malaysia sendiri untuk membuka hubungan diplomatiknya dengan India di awal kemerdekaan Malaysia tahun 1957. Malaysia menyatakan dukungannya terhadap India pada perang India-Pakistan di tahun 1965. Hal ini menimbulkan kontroversi mengingat Malaysia merupakan negara dengan dominasi agama Islam. Perlakuan India terhadap minoritas muslim di negaranya yang diskriminatif tidak terlalu mempengaruhi persepsi dan kebijakan luar negeri Malaysia terhadap India pada saat itu (Singh 2011).

Meskipun diaspora telah muncul sebagai faktor kuat dalam mengembangkan hubungan antara negara-negara, tampaknya diaspora justru bekerja dalam kerangka sebaliknya dalam kasus hubungan India-Malaysia, dan beberapa insiden yang tidak menguntungkan lainnya di Malaysia yang melibatkan diaspora India.

Di akhir tahun 1960-an, India di bawah kepemimpinan Indira Gandhi pada saat itu secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Malaysia menyangkut isu klaim Sabah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen antara India dan Malaysia untuk saling mendukung dan membuat hubungan antara kedua negara lebih berkembang dan terarah. Hal ini dimulai dengan adanya pelatihan angkatan udara Malaysia yang difasilitasi oleh India kemudian berlanjut pada pertukaran teknologi dan budaya antara kedua negara (Balakhrisnan 2001). Hubungan bilateral yang baik antara India dan Malaysia ini kemudian mengalami penurunan ketika India mengadakan percobaan nuklir pada tahun 1974 dan pada tahun 1998. Malaysia dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap percobaan nuklir oleh India tersebut sejalan dengan prinsip anti-nuklir ASEAN. Namun perihal nuklir ini tidak menjadi masalah yang berkepanjangan pada hubungan kedua negara ini dikarenakan India sendiri menyatakan untuk tidak akan menggunakan nuklir tersebut dan menyetujui perjanjian kawasan bebas senjata nuklir dengan ASEAN (Balakhrisnan 2001).

Pengaruh Diaspora India terhadap Hubungan Bilateral India – Malaysia

Meskipun diaspora telah muncul sebagai faktor kuat dalam mengembangkan hubungan antara negara-negara, tampaknya diaspora justru bekerja dalam kerangka sebaliknya dalam kasus hubungan India-Malaysia, dan beberapa insiden yang tidak menguntungkan lainnya di Malaysia yang melibatkan diaspora India. Terpisah secara garis rasial, yang kemudian diperkuat oleh perbedaan agama, budaya, bahasa dan pekerjaan, masyarakat Malaysia menghadapi

ancaman kekerasan etnis yang konstan dengan diaspora India. Inti permasalahan terletak pada kondisi sosial dan ekonomi PIO di Malaysia. Dalam segmentasi masyarakat di Malaysia, orang-orang asal India tertinggal jauh di belakang banyak indikator sosio-ekonomi dan berada di status lumpental. Empat puluh persen kejahatan serius di Malaysia dilakukan oleh orang India; terdapat 38 geng berbasis India dengan 1500 anggota aktif. Diaspora India juga menyumbangkan jumlah tertinggi dari mereka yang ditahan dalam *Emergency Regulations*. Selanjutnya, diaspora India memiliki tingkat bunuh diri tertinggi, dan menyumbang 20% kasus pelecehan anak dan istri dan 14% kenakalan remaja. Di Kuala Lumpur, diaspora India terdiri atas 15% penghuni liar (Singh 2014).

Setelah kerusuhan rasial yang terjadi tahun 1969, kebijakan Bumiputera diinisiasi oleh Pemerintah Malaysia yang merangkul Penduduk Asli Malaysia menjadi faktor utama marginalisasi diaspora India. Saat ini, etnis India tidak sendirian dalam mengungkapkan keluhannya terhadap kebijakan yang mengutamakan Bumiputera Malaysia. Bahkan tidak sedikit orang Melayu yang bosan dengan kebijakan Bumiputera dan merasa bahwa kebijakan tersebut hanya bermanfaat bagi orang kaya dan berkuasa, terutama etnis Tionghoa (Singh 2014). Oleh karena kebijakan ini, muncul fenomena diaspora India yang miskin, buta huruf, dan direbut haknya secara politis, yang mana berada terhimpit di antara orang-orang Melayu yang memiliki kepentingan politik dan etnis Tionghoa yang secara ekonomi kuat.

Terlepas dari diskriminasi sosial budaya dan politik yang terus berlanjut terhadap etnis India di Malaysia, meningkatnya Islamisasi masyarakat Malaysia juga merupakan salah satu faktor utama bagi marginalisasi rasial yang terjadi di Malaysia. Najib menggarisbawahi bahwa Malaysia 'tidak pernah sekuler karena sekuler menurut

definisi Barat berarti pemisahan prinsip-prinsip Islam dalam cara kita memerintah negara ini' (Bernama.com 2007 dalam Singh 2014). Pernyataan Najib di atas, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia masa itu, jelas menunjukkan sikap elit politik Melayu terhadap agama dan minoritas lainnya di Malaysia. Menurut T.M. Ramachandran, pendiri Hindu Rights Action Force (HINDRAF), kelompok Islam radikal berada di balik kebangkitan fundamentalisme Islam di Malaysia dan tidak peduli dengan hak-hak agama non-Muslim. Oleh sebab itu, kaum Hindu adalah pihak yang paling tidak diuntungkan dalam kasus ini. Selama beberapa tahun terakhir, bentuk Islam Wahabbis mengalami peningkatan di Malaysia. Oleh karena itu, kaum non-Muslim, terutama orang Hindu, merasa bahwa mereka benar-benar marjinal terhadap etos, norma dan tradisi budaya yang dominan (Singh 2014).

Kebencian di kalangan etnis India terkait perihal marginalisasi yang dialaminya di Malaysia memuncak dalam demonstrasi bersejarah di Malaysia pada tanggal 25 November 2007. Peristiwa ini menjadi momentum menggema suara kondisi menyedihkan etnis India di negara tersebut. HINDRAF, sebuah badan yang terdiri dari 30 organisasi, bertindak sebagai pimpinan komando demonstrasi. Di bawah bendera HINDRAF, ribuan orang bergabung dalam demonstrasi damai melawan marginalisasi, menuntut dalam penyangkalan pekerjaan, upah yang adil, fasilitas pendidikan, reformasi pemilihan serta persamaan atas kesempatan dan hak. Intensi pemerintah Malaysia untuk menghancurkan 79 kuil Hindu atas nama pembangunan dan koversi paksa menjadi pemicu lanjutan dalam demonstrasi tersebut. Demonstran turut menyampaikan dukungannya atas tuntutan hukum senilai 4 triliun USD yang diajukan di London pada bulan Agustus 2007. Fokus tuntutan tersebut adalah supaya Inggris memberikan

kompensasi kepada diaspora India di Malaysia karena telah membawa leluhurnya sebagai buruh tetap dan mengeksploitasinya. Agenda lain yang menjadi tujuan dari demonstrasi ini tidak lain adalah untuk mengubah Pasal 153 Konstitusi Malaysia yang memberikan supremasi kepada etnis Melayu (Singh 2014). Namun, Pemerintah Malaysia membubarkan demonstrasi damai tersebut dan menghubungkan para demonstran dengan Liberation Tiger of Tamil Eelam. Alih alih meredakan ketegangan, hal ini justru semakin memperkuat kebencian terhadap Barisan Nasional, dan terutama terhadap MIC.

Selama kampanye pemilihan umum tahun 2008, HINDRAF menggunakan metode yang mengikuti perkembangan arus zaman, yaitu Internet dan media sosial, untuk menyoroti kondisi diaspora India yang malang serta untuk mempromosikan tuntutan dan agenda mereka. Hal ini mengakibatkan penyatuan dan kebangkitan masyarakat India Malaysia. Akibatnya, BN mulai berkuasa hanya berdasarkan kekuatan mayoritas dan MIC dikurangi menjadi tiga kursi dari yang sebelumnya sembilan. Bahkan Samy Vellu, pemimpin veteran MIC, kalah dalam pemilihan. Dengan mengambil tanggung jawab atas kinerja koalisi yang tidak mengesankan tersebut, Perdana Menteri Abdullah Badawi mengundurkan diri dan Najib Tun Razak ditunjuk sebagai penggantinya, pada bulan April 2009. Setelah mengambil alih posisi sebagai Perdana Menteri Malaysia, Najib mencoba memperbaiki masalah sosial budaya dan kondisi politik-ekonomi negara, termasuk keluhan etnis India menjadi salah satu sorotan. Namun upaya tersebut masih belum menampakkan hasil yang maksimal.

Kerugian tersebut berlanjut pada pemilihan umum 2013, dan tercatat hasil pemilihan terburuk yang dialami oleh Barisan Nasional. BN memang berhasil mendapatkan kembali Kedah, namun kalah beberapa kursi lagi di Parlemen bersamaan *popular vote* di

Pakatan. BN memenangkan hanya 47% suara rakyat, namun berhasil memperoleh 60% dari 222 kursi parlemen, sehingga mempertahankan kontrol parlemen. Selain itu, pemilihan umum 5 Mei 2013 di Malaysia menggarisbawahi bahwa diaspora India di Malaysia tidak dapat menantang koalisi yang berkuasa karena pemimpin HINDRAF yaitu P. Wathya Moorthy secara sembunyi-sembunyi menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan United Malays National Organisation, yang mendukung tempat kabinet di pemerintah. Hal ini membahayakan persatuan Komunitas India di Malaysia, terutama HINDRAF yang menjadi penopang pada tahun 2008 karena elakukan perlawanan terhadap koalisi yang berkuasa, BN, dua pertiga mayoritas untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia (Singh 2014).

Ketegangan antar ras serupa yang melibatkan etnis India pernah terjadi di Malaysia sebelumnya di tahun 2003. Peristiwa tersebut melibatkan 300 orang tenaga kerja profesional di bidang teknologi informasi mengalami perlakuan buruk dan “diinterogasi” oleh pihak berwenang Malaysia. Pada saat itu, terdapat sekitar 40.000 ekspatriat India bekerja di Malaysia, termasuk profesional teknologi informasi, insinyur, dokter, akademisi dan eksekutif yang terlibat dalam *joint venture*. Terkait dengan reaksi dari Pemerintah India, dapat dilihat bahwa New Delhi memperingatkan Kuala Lumpur bahwa setiap pengulangan insiden semacam itu akan mempengaruhi hubungan bilateral di antara keduanya. Pemerintah India mengindikasikan bahwa akan memeriksa kembali kesepakatan bilateral dan konsesi terkait perdagangan lainnya yang diberikan ke Malaysia. Foreign Regional Registration Office (FRRO), termasuk yang ada di Bangalore, diperintahkan untuk memverifikasi kredensial warga negara Malaysia yang terdaftar di India. India juga menyatakan ketidakmampuannya untuk menjadi tuan rumah Menteri Kesehatan Malaysia menjelang akhir

Maret 2003. Puncaknya, pernyataan ketidaksenangan yang kuat terhadap kebrutalan polisi diungkapkan oleh Komisaris Tinggi India, Veena Sikri menghasilkan permintaan maaf dari pemerintah Malaysia. Sedangkan tanggapan yang berbeda muncul dalam babak ketegangan tahun 2007, ketika polisi Malaysia menggunakan gas air mata untuk memberhentikan ribuan diaspora India yang menuntut keadilan terkait permasalahan marginalisasi dan diskriminasi sosial ekonomi. Setelah gelombang protes berakhir, diaspora India meminta pemerintah India untuk menghentikan semua proyek bisnis sekarang dan masa depan dengan Malaysia, yang mengindikasikan potensi ketegangan hubungan bilateral yang akantimbul dari diskriminasi etnis India di Malaysia.

Namun, perlu dicatat bahwa sementara New Delhi lebih vokal dalam melindungi kepentingan orang asing ekspatriat, termasuk mereka yang bekerja sebagai profesional TI di Malaysia pada tahun 2003, saat ini, telah tampak enggan untuk mengambil langkah terkait diskriminasi rasial yang terjadi pada tahun 2007. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran munculnya rasa ketidaksenangan oleh pemerintah negara *host*. Akan tetapi kekhawatiran tersebut perlahan mulai mengalami pergeseran, sejak P. Wathya Moorthy, pemimpin HINDRAF memilih untuk pindah ke Tamil Nadu guna menghindari tekanan dari otoritas Malaysia. Hal inilah yang mendorong pemerintah India untuk terlibat dalam permasalahan rasial tersebut. Beberapa pejabat pemerintah dan media India secara terbuka mengkritik perlakuan pemerintah Malaysia terhadap diaspora India di Malaysia. Beberapa pernyataan awal yang menjadi perhatian dari tokoh-tokoh penting pemerintah India, Manmohan Singh, selaku Perdana Menteri India kala itu mengatakan 'New Delhi terganggu oleh laporan tentang penggunaan kekerasan terhadap para pemrotes di negara Islam multikultural' (Singh 2014). Persekutuan antara United Progressive Alliance (UPA),

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) turut mengungkapkan keprihatinannya atas penderitaan orang-orang Malaysia Tamil dan menuntut intervensi vokal dari pihak pusat dalam masalah tersebut. Pemimpin All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), J. Jayalalitha dan pemimpin Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) Vaiko juga angkat bicara terkait marginalisasi diaspora India di Malaysia. Kendati demikian, Pemerintah Malaysia tidak memberikan respons secara positif atas komentar-komentar tersebut. Pemerintah India segera menyadari bahwa mereka harus menahan diri untuk tidak terlalu mencampuri masalah ini jika tidak ingin membahayakan hubungan dengan Malaysia.

Meski sempat memilih untuk harus menahan diri untuk tidak terlalu mencampuri masalah, perlahan Partai Kongres India mendapatkan tekanan dari mitra koalisinya seperti Dravida Munnetra Kazhagam dan juga faksi-faksi publik yang menuduh pemerintah menutup mata terhadap perlakuan buruk diaspora India di Malaysia. Isu tersebut memosisikan Partai Kongres dalam dilema. Jika terlalu ikut campur masalah ini, hal itu bisa membahayakan hubungannya dengan Malaysia. Akan tetapi jika memilih tetap diam, maka berisiko menghadapi murka dari mitra koalisinya dan masyarakat India. Dengan pemilihan umum di depan mata, keterlambatan dalam mengambil keputusan mungkin belum tentu menjadi pilihan tepat.

Kesimpulan

Kebijakan India terhadap permasalahan diaspora memiliki dinamika yang berkembang sesuai dengan sejarah politik di negara itu sendiri. Perhatian yang mulanya terfokus pada perlakuan terhadap buruh migran India selama fase nasionalis mulai dikikis dan tergantikan oleh pengabaian di era pasca kolonial. New Delhi mengembangkan kecenderungan untuk melihat buruh migran yang terampil yang

meninggalkan tanah kelahirannya sebagai salah satu fenomena *brain drain*. Namun, pada dekade terakhir abad kedua puluh, memasuki periode liberalisasi percepatan ekonomi, nilai dari diaspora ditemukan kembali, dan India mengadopsi pendekatan konstruktif terhadap diaspora India. Redefinisi nilai dari diaspora yang disertai pendekatan inilah yang menjadi salah satu dari sekian faktor-faktor pendorong kemajuan India di berbagai lini, termasuk dalam ekonomi dan hubungan eksternalnya.

Diaspora India merupakan salah satu diaspora tersebar di dunia, yang mencapai lebih dari 20 juta orang, dan tersebar di 136 negara. Meski dinilai sebagai aset strategis yang mampu meningkatkan iklim investasi maupun perdagangan, persebaran diaspora di negara-negara yang memiliki latar belakang yang berbeda pun menimbulkan gesekan kultural. Benturan antar budaya dan ras ini mampu membahayakan bagi hubungan diplomatik India dengan negara host apabila tidak dikelola secara tepat, salah satunya yang terjadi di Malaysia. Meskipun berperan dalam meningkatkan hubungan bilateral, namun diaspora India juga berada dalam keadaan yang rapuh. Kasus kekerasan terhadap diaspora India yang terjadi pada tahun 2003 di Malaysia sempat meregangkan kedua negara yang memiliki hubungan baik dengan latar belakang kesamaan historis ini.

Keberadaan diaspora India dapat secara tidak langsung memengaruhi arah kerjasama negara India dan Malaysia. Diaspora India di sini berdiri sebagai suatu kelompok etnis yang berada pada wilayah domestik Malaysia namun merupakan sumber daya manusia dari luar wilayah Malaysia. Pengaruh ini sebenarnya tidak terlalu memperlihatkan aktivitas nyata dari

diaspora India seperti melakukan proses diskusi dengan pemerintah negara tertentu, tetapi hanya sekadar dengan membawa identitas kelompok etnis dengan jumlah yang besar. Efektifitas diaspora India terhadap hubungan bilateral India dan Malaysia sendiri tergolong menengah. Diaspora India di Malaysia memiliki kapasitas yang cukup untuk mempengaruhi hubungan bilateral yang ada, namun karena berbagai regulasi di Malaysia yang diskriminatif membuat perkembangan dari diaspora India di Malaysia menjadi terhambat sehingga menempatkan diaspora India sebagai kaum bawah di Malaysia.

Apabila India merasa memiliki kewajiban untuk memberdayakan diaspora India di Malaysia, maka solusi yang tepat adalah menerapkan strategi dengan cara yang halus namun tidak menonjol.

Apabila India merasa memiliki kewajiban untuk memberdayakan diaspora India di Malaysia, maka solusi yang tepat adalah menerapkan strategi dengan cara yang halus namun tidak menonjol. Pertama, India harus menyadari bahwa tidak semua diaspora India di Malaysia kekurangan secara ekonomi. Dalam membandingkan koefisien Gini, nilai koefisien di antara orang India meningkat dari 0,413 pada tahun 1999 menjadi 0,425 pada tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksetaraan di antara diaspora India di Malaysia sendiri. Oleh karena itu, bantuan apapun harus ditargetkan pada diaspora India yang berpenghasilan rendah dan bukan kepada keseluruhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, India harus memiliki strategi spesifik dalam memperbaiki standar kehidupan diaspora India di Malaysia yang kurang mampu tersebut. India, yang cepat menjadi pusat pendidikan terutama untuk teknologi informasi, manajemen dan kedokteran, dapat menawarkan beasiswa untuk diaspora India di Malaysia yang berpenghasilan rendah. Pemerintah India juga dapat menggalang asosiasi dagang dan bisnis India untuk menawarkan beberapa bentuk bantuan keuangan atau

pelatihan keterampilan tertentu yang dapat dipekerjakan.

Namun, pemerintah India perlu mempertimbangkan tingkat bantuannya terhadap diaspora, mengingat keadaan segmen yang signifikan dari populasi di negaranya sendiri. Diaspora India di Malaysia, dan diaspora di tempat lainnya, harus menyadari bahwa mereka tidak dapat beralih ke India untuk mendukung mereka guna menghadapi masalah di negara host. Melakukan hal itu hanya akan menempatkan India dan pemerintahannya dalam posisi genting dengan negara lain dan membahayakan kebangkitan global India. Beberapa tahun setelah kemerdekaan India, Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, mengatakan kepada diaspora India bahwa mereka harus mengintegrasikan diri sepenuhnya ke negara-negara adopsi mereka karena kesetiaan mereka harus didasarkan, terutama, pada negara-negara pilihan mereka. Sudah waktu yang tepat untuk pemerintah India saat ini mengulangi mantra tersebut kepada diasporanya yang meluas di seluruh dunia.

Maka, berdasarkan temuan dari hasil penelitian ini, gerakan pekerja migran

transnasional dalam sejarah memiliki pengaruh besar bagi negara-negara untuk mengembangkan ekonomi dan mengelola keamanan dalam negeri. Diaspora adalah salah satu warisan sejarah bagi masyarakat India. Diaspora telah memiliki koneksi jaringan yang kuat dari India di seluruh dunia untuk berbagi isu sosial, mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi di negara home. Terkait dengan kebijakan Malaysia yang mengutamakan kepentingan etnisnya, melalui semangat diaspora, PIO berupaya untuk menguatkan identitasnya di tengah isu ketidaksetaraan yang terjadi. Selain upaya yang dilakukan oleh PIO untuk mengurangi kohesi sosial yang terjadi. Pemerintah dari kedua belah pihak menyadari bahwa kohesi sosial yang terjadi dapat menjadi retakan yang berbahaya bagi hubungan bilateral. Oleh karenanya, semangat integrasi kepada India oleh diaspora yang dituangkan dalam peran di multiaspek, terutama pembangunan ekonomi, akan menjadi jembatan bagi Malaysia yang memiliki kebijakan yang mengutamakan kepentingan bumiputera, dengan India yang mendorong peran diasporanya melalui kebijakan luar negerinya.

Daftar Pustaka

- [1] Singh, Amit. 2014, *Indian Diaspora as a factor in India – Malaysia Relations*, Organization for Diaspora Initiatives, New Delhi.
- [2] Dubey, Ajay, ed. 2003, *Indian Diaspora: Global Identity*. Kalinga Publications, New Delhi.
- [3] Balakrishnan, K. S. 2001, 'Malaysia – India Relations: Trends in Security and Economic Cooperation Within the Developing World', *Journal of Diplomacy and Foreign Relations* Volume 3, Number 1.
- [4] Gopal, Parthiban S. Premalatha Karupiah. 2013, 'Indian Diaspora and Urban Poverty: A Malaysian Perspective'. *Diaspora Studies*, Volume 6, Issue 2.
- [5] Singh, Amit. 2011, 'India – Malaysia Strategic Relations', *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, Volume 7, Number 1.
- [6] Rao, Ashok. 'The Indian Diaspora – Past, Present and Future', diakses dari <https://www.tie.org/article/indian-diaspora-past-present-andfuture-ashok-rao> [diakses pada 15 September 2016].